



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 116 /KOP, UKM,PERINDAG TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBERIAN SUBSIDI HARGA SEMBAKO DALAM RANGKA STABILISASI
PELAKSANAAN PERCEPATAN PENGENDALIAN INFLASI
DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023**

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK 07/022 tentang Belanja Wajib Perlindungan Sosial dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022;
- b. bahwa sesuai Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 5000/4825/SJ Tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah poin 8 (delapan)
- c. bahwa sesuai Intruksi Gubernur Jambi Nomor : 2689/INGUB/SETDA.PRKM-1.1/2022 tentang Gerakan bersama Pembelian Beras Lokal / Bulog oleh Aparatur Sipil Negara se- Provinsi Jambi
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Subsidi Harga Sembako Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan dan Pelaksanaan Percepatan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Bungo Tahun 2023
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang- Undang..... 2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
6. Peraturan Menteri Perekonomian bidang Perekonomian RI Nomor 10 Tahun 2017 tentang mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Inflasi Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 283);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 34);
15. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 32);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Bungo Nomor 151/Perekonomian Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bungo Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN SUBSIDI HARGA SEMBAKO DALAM RANGKA STABILISASI PELAKSANAAN PERCEPATAN PENGENDALIAN INFLASI DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023**

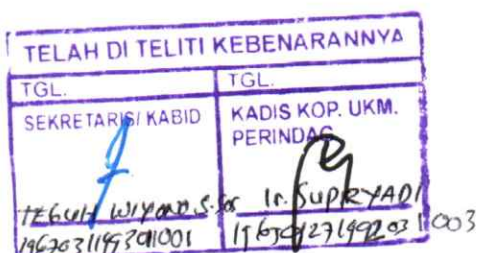
KESATU : Memberikan Subsidi Harga Sembako Dalam Rangka Stabilisasi Pelaksanaan Percepatan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Bungo Tahun 2023 dengan jenis dan besaran Subsidi sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tata cara pelaksanaan pemberian Subsidi dalam Rangka Stabilisasi Harga Sembako dan Pelaksanaan Percepatan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Bungo diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 Melalui Anggaran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo Nomor DPA 3.30.04.2.02.03

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Maret 2023.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 3 April 2023



SEKDAKAB. BUNGO

BUPATI BUNGO
Drs. MARSIDI, M.M.
H. MASHURI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 116 / KOP, UKM, PERINDAG TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN SUBSIDI HARGA SEMBAKO DALAM RANGKA STABILISASI
PELAKSANAAN PERCEPATAN PENGENDALIAN INFLASI DI KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2023

JENIS SUBSIDI BAHAN DAN HARGA SEMBAKO DALAM RANGKA
STABILISASI HARGA SEMBAKO DAN PELAKSANAAN PERCEPATAN INFLASI DI
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

No	Jenis Barang Yang di Subsidi	Besaran Subsidi Harga / Kg (Rp)	Keterangan
1	Beras Premium	2.000 s/d 4.000	
2	Gula Pasir	2.500 s/d 5000	
3	Minyak Goreng	2.500 s/d 5000	
4	Telur Ayam	5000 s/d 10.000	

TELAH DI TELITI KEBENARANNYA

TGL.	TGL.
SEKRETARIS KABID	KADIS KOP, UKM, PERINDAG

TUGU WICAKSONO 19650127199203 1003

SEKDA KAB. BUNGO
BUPATI BUNGO
Drs. MUSSIDI, M.M.
H. MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN

KASUBBAG PERSID	KABAG. HUKUM
TGL.	TGL.

DASMAWATI, SH NIP. 19730127199203 1003
ALEK PURWENDI, SH M.P NIP. 19730127199203 1003